

## **Dinasti Politik pada Pemerintahan di Tingkat Lokal**

**Adelia Fitri**

Mahasiswa Magister Politik dan Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Gajah Mada  
[adeliafitri93@gmail.com](mailto:adeliafitri93@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This paper will explore the phenomenon of local politicians who perpetuate power through political dynasties at the local government level. This is important to discuss because Indonesia as a democratic country in an era of transparency and accountability needs visionary leaders who properly represent the people in accordance with their capacities and capabilities. The focus of this study examines the electoral system that occurs at the local level through politicians who build political dynasties in Riau Islands Province. Riau Islands Province was made a study area because there were still phenomena of families becoming politicians in the 2019 general election. To obtain comprehensive data, the authors used research data collection through library research. The results of the study found that political dynasties can occur due to several factors, among others, in the context of a plural or plural society such as Indonesia, individual political behavior will be strongly influenced by the production of social, economic, psychological, historical, political and cultural factors. Second, the absence of periodic restrictions makes candidates who have charismatic and popularity in the community continue to run themselves as a great opportunity for families to participate in electoral politics at the local level.*

**Keywords: Political Dynasty, Restriction of Perodesasi, Politics of Patronage**

### **ABSTRAK**

Tulisan ini akan mengeksplorasi fenomena politisi lokal yang melanggengkan kekuasaan melalui dinasti politik pada pemerintahan di tingkat lokal. Hal ini penting untuk dibahas karena Indonesia sebagai negara demokrasi di era transparansi dan akuntabilitas butuh pemimpin yang visioner dan benar mewakili rakyat sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya. Fokus kajian ini mengupas sistem elektoral yang terjadi tingkat lokal melalui aktor politisi yang membangun dinasti politik di Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau dijadikan wilayah pengkajian karena masih terdapat fenomena keluarga menjadi politisi pada pemilihan umum tahun 2019. Untuk mendapatkan data yang komprehensif, penulis menggunakan pengumpulan data penelitian melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menemukan bahwa

dinasti politik bisa terjadi karena beberapa faktor antarlain pertama, dalam konteks masyarakat yang majemuk atau plural seperti Indonesia, perilaku politik individu akan sangat dipengaruhi oleh produksi faktor-faktor sosial, ekonomi, psikologi, sejarah, politik dan budaya. Kedua, tidak adanya pembatasan perodesasi membuat kandidat yang memiliki kharismatis dan popularitas di masyarakat terus mencalonkan diri sebagai kesempatan besar bagi keluarga untuk ikut dalam politik electoral ditingkat lokal.

**Keyword: Dinasti Politik, Pembatasan Perodesasi, Politik Patronase**

## **I. Pendahuluan**

Tulisan ini akan mengeksplorasi fenomena politisi di tingkat lokal yang melanggengkan kekuasaan melalui dinasti politik pada pemerintahan di tingkat lokal. Hal ini penting untuk dibahas karena Indonesia sebagai negara demokrasi serta asas transparansi dan akuntabilitas butuh pemimpin yang visioner dan benar mewakili rakyat sesuai dengan kapasitasnya. Fokus kajian ini mengupas sistem elektoral yang terjadi tingkat lokal melalui aktor politisi yang membangun dinasti politik di Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau dijadikan wilayah pengkajian karena masih terdapat fenomena keluarga menjadi politisi pada pemilihan umum tahun 2019. Memberikan kesempatan bagi politisi petahana yang berlatar belakang "senior" pengusaha, politisi, mantan narapidana, *local strongman* dan elit partai politik akan membuat fenomena politik di tingkat lokal tidak sesuai dengan iklim demokrasi yang semestinya. Aktor politisi ditingkat lokal mempertahankan kekuasaan dengan membangun benih dinasti politik sering terjadi. Hal ini didukung dengan tidak adanya peraturan untuk membatasi perodesasi bagi politisi untuk melakukan pencalegan setiap tahun. Pemberian kesempatan bagi wajah baru melalui pembatasan periodisasi lembaga legislatif menjadi sebuah keniscayaan. Fenomena calon legislatif ditingkat lokal membangun calon dinasti politik di tingkat lokal dan pentingnya pembatasan periodisasi di lembaga legislatif .

Dinasti politik dipahami sebagai wujud kontrol kekuasaan pada pemerintahan di tingkat lokal. Dinasti politik dalam artian politik tradisional yaitu dimana penguasa berupaya meletakkan keluarga, saudara dan kerabatnya pada jabatan-jabatan starategis dengan tujuan untuk membangun suatu kerajaan politik di dalam pemerintahan. Upaya ini dilakukan dengan tujuan mereka (nasional maupun lokal). Upaya ini dilakukan dengan tujuan mereka yang menjadi anggota dinasti politik akan saling menjaga agar kekal

dalam kekuasaan (eksekutif, legislatif maupun yudikatif). Menempatkan keluarga atau saudara di jabatan-jabatan strategis akan memudahkan penguasa untuk mengontrol dan mengendalikan semua hal yang diperlukan penguasa<sup>1</sup>. Saluran politisi untuk memberikan sumbangsih pengontrolan salah satunya berada di tataran legislatif seperti Lembaga perwakilan rakyat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yakni DPR RI (dewan perwakilan rakyat), DPRD Provinsi, kota dan kabupaten, serta DPD (dewan perwakilan daerah). Sebagai lembaga perwakilan rakyat secara legitimasi dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Keterwakilan isu-isu untuk diperjuangkan di dalam parlemen selalu menjadi senjata para politisi mendapatkan suara dari pendukungnya. Setiap periode pesta demokrasi tidak jarang para politisi yang sama ikut mencalonkan bahkan membawa serta keluarga-keluarganya ikut mencalonkan.

Di Indonesia pasca orde baru telah menerapkan desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi big bang dimana elit politik basis pusat dan daerah berjuang untuk kewenangan tingkat daerah. Ternyata desentralisasi bukan akhir dari demokrasi lemahnya bangsa dalam memobilisasi elit dan fragmentasi administrasi Desentralisasi sendiri memiliki efek samping seperti jaringan patrimonial dan korupsi kedaerah, mengkontrofosi massa dan membekinginya dengan *strongman* untuk protes kepada pemda. Muncul tiga kelompok yaitu : pertama, terbentuk dari keluarga yang berasal dari aristokrat yang bertahan hidup hingga desentralisasi, kedua bos partai pilar orde baru, ketiga pendatang baru pembentukan provinsi baru<sup>2</sup>

Menurut Joseph Schumpeter, demokrasi adalah suatu pemerintahan dimana rakyat memiliki kebebasan dan kesempatan untuk menerima atau menolak para politisi yang memerintah<sup>3</sup>. Schumpeter menyatakan bahwa esensi demokrasi adalah adanya mekanisme kompetitif memilih pemimpin melalui kontestasi mendapatkan suara rakyat. Hal ini sesuai dengan fenomena aktor politisi yang bertarung di tingkat lokal untuk mendapatkan suara masyarakat secara masif dan bahkan melanggengkan dinasti politik

---

<sup>1</sup> Agustino Leo. 2014. politik lokal dan otonomi daerah. Bandung: Alfabeta hlm: 209-211

<sup>2</sup> Bunte Marco Dan Ufen Andreas. 2009, Democratization On Post Soeharto Indonesia. Rotledge Contemporary Southeast Asia Series

<sup>3</sup> Schumpeter, Joseph A., (1972). Capitalism, socialism, and democracy. New York

untuk menjaga kekuasaannya. Menurut Schumpeter berwujudan demokrasi sebagai mekanisme pemilihan umum. Pemilu merupakan ajang untuk merebut suara rakyat dan mengontrol aktor yang memiliki kapasitas melakukan fungsi representasi. Pada hal ini demokrasi diwujudkan melalui mekanisme pemilihan umum kendatinya pesta demokrasi demi terciptanya pemilihan wakil rakyat sesuai kehendak rakyat. Menurut Beetham demokrasi bukan sekedar pemilihan umum namun sebagai kontrol publik terhadap pemerintahan.<sup>4</sup> Beetham menerangkan bahwa demokrasi merupakan wujud dari akuntabilitas dan transparansi di pemerintahan yang berujung pada terciptanya tatanan sosial dan politik yang setara. Setiap manusia memiliki kesamaan hak dalam berpolitik dan memiliki tanggungjawab untuk melakukan kontrol terhadap sistem yang telah berjalan.

Pada ranah ditingkat nasional dinasti politik juga telah ditemukan berikut upaya pembangunan dinasti politik di Indonesia dimulai dari tingkat nasional yakni :

#### **Beberapa Politik Kekerabatan di Indonesia<sup>5</sup>**

<p><b>Megawati Soekarno Putri</b></p> <p>Taufik Keamas (suami) Ketua MPR (2009-2014), Ketua majlis pertimbangan partai PDIP</p> <p>Puan Maharani (anak) anggota DPR (2009-2014)</p> <p>Guruh SoekarnoPutra (anak) anggota DPR (2009-2014)</p> <p>Puti Guntur SoekarnoPutri (keponakan) anggota DPR(2009-2014)</p> <p>Nazarudin Kiemas (adik Taufik) anggota DPR (2009-2014)</p>	<p><b>Anggota DPD dari Maluku Utara Mudaffar Sjah</b></p> <p>Nita Budi Susanti (Istri) anggota DPD 2009-2014</p> <p><b>Bupati Kutai Kertanegara Rita Widayari</b></p> <p>Syakuani Hasan Rais (bapak) bupati Kutai Kertanegara (2005-2009)</p> <p><b>Ketua DPR Marzuki Alie</b></p> <p>Asmawatie (istri) anggota DPD Sumsel 2009-2014</p>
---	--

<sup>4</sup> Beetham, David.1999. Democracy and Human Right. Oxford: Polity Press.

<sup>5</sup> Sumber: Harjanto, politik kekerabatan dan institusional partai politik di Indonesia diakses melalui [https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/36869050/harjanto-politik-kekerabatan.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DPolitik+Kekerabatan+dan+Institusionalisa.pdf&Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20190807%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4\\_request&X-Amz-Date=20190807T083440Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=790feadabeb4436d3befdd4bf004922bcbc34cbf4565e53d2278aa85197d8a52](https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/36869050/harjanto-politik-kekerabatan.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DPolitik+Kekerabatan+dan+Institusionalisa.pdf&Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20190807%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20190807T083440Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=790feadabeb4436d3befdd4bf004922bcbc34cbf4565e53d2278aa85197d8a52) pada Agustus 2019

<p><b>Susilo Bambang Yudhoyono</b> Edhi Baskoro Yudhoyono (anak) sekretaris jendral PD(2010-2015), anggota DPR (2009-2014) Agus Harimurti Yudhoyono (anak) calon gubernur Jakarta 2014 Hartanto Edhi Wibowo (adik ani yudhoyono) anggota DPR (2009-2014) Hadi Utomo (adik ipar) ketua umum PD Nurchahyo Anggoro Jati (anak Hadi Utomo) : anggota DPR 2009-2014</p>	<p><b>Bupati Bantul Sri Suryawidati</b> Idham Samawi (suami): Bupati Bantul (2005-2010)  <b>Bupati Kediri Hariyanti</b> Sumsno (suami): Bupan Kediri (2000-2005, 2005-2010).</p>
--	--

Pada tataran nasional maupun diseluruh Indonesia praktik dinasti politik telah terjadi hingga ketinggian lokal. Hal ini lebih mendalam untuk melakukan analisa melalui proses elektoral di tingkat lokal khususnya Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau dipilih sebagai wilayah pengkajian sebab partisipasi politik di Kepulauan Riau pada pemilihan umum tahun 2019 meningkat dibandingkan pemilu sebelumnya. Di Provinsi Kepulauan Riau terdapat beberapa pasangan suami istri yang mencalonkan sebagai calon legislatif diantaranya di Tanjung Pinang ibu kota Provinsi Kepulauan Riau Lis Darmansyah dan Weni Pustoko, Lis merupakan caleg DPRD Kepri dapil 1 dan istrinya calon legislatif kota Tanjung Pinang. Huznizar Hood calon legislatif DPRD RI dan istrinya Peppy Chandra sebagai calon legislatif Tanjung Pinang<sup>6</sup>. Di lain wilayah yakni Kabupaten Karimun ayah dan anak mencalonkan diri sebagai calon legislatif yakni Rocky Marciano Bawole merupakan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dapil Karimun periode 2009-2014 hingga 2014-2019 serta mencalonkan kembali dirinya dan anaknya M.Ewal Risbalqi calon legilatif dapil Karimun<sup>7</sup>. Beberapa elit yang sudah menjabat beberapa periode. Berikut tabel yang menunjukkan dinasti politik ditingkat lokal di Kepulauan Riau.

<sup>6</sup> Sumber:Patria. Fenomena Suami istri jadi caleg di Kepri.Tribun Batam.id. diakses melalui <https://batam.tribunnews.com/2018/07/23/fenoma-suami-istri-jadi-caleg-di-kepri-ini-pandangan-pengamat-politik-tanjungpinang?page=3> pada Agustus 2019

<sup>7</sup> Sumber: Pemuda 22 tahun ditemani ayahnya mendaftarkan diri menjadi bacaleg pemilu 2019 dapil karimun diakses melalui <https://batam.tribunnews.com/2018/02/23/pemuda-22-tahun-ini-ditemani-ayahnya-daftar-jadi-bacaleg-pemilu-2019-dapil-karimun> pada Agustus 2019

**Beberapa Politik kekerabatan di Provinsi Kepulauan Riau**

<p><b>Lis Darmansyah</b> (pernah menjabat sebagai walikota Tanjung Pinang periode 2013-2018, anggota legislatif DPRD Provinsi Kepulauan Riau 2019-2024) Yuniarni Weni Pustoko (Istri) (anggota legislatif DPRD Provinsi Kepulauan Riau periode 2014-2019, anggota DPRD kota Tanjung Pinang 2019-2024)</p> <p><b>Huznizar Hood</b> (suami) calon legislatif DPR RI Peppy Chandra (Istri) anggota DPRD Kota Tanjung Pinang periode 2014-2019, anggota DPRD kota Tanjung Pinang periode 2019-2024</p>	<p><b>Rocky Marciano Bawole</b> (Ayah) anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dapil Karimun periode 2009-2014 hingga 2014-2019, anggota DPRD Provinsi Kepri dapil Karimun 2019-2024. M.Ewal Risbalqi (Anak) Calon legislatif dapil Karimun</p>
--	--

Sumber: Tribun News

Fakta empiris menemukan bahwa dinasti politik yang terbentuk di Provinsi Kepulauan Riau masih terjadi. Secara umum dinasti politik ditunjukkan oleh masih adanya jabatan politik dipegang keluarga di lingkungan pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau.

Beberapa studi yang relevan dengan riset ini diantaranya riset yang dilakukan oleh Amalinda Savirani dengan judul *Survival against the odds: the Djunaidi family of Pekalongan, Central Java*. Riset ini membahas kasus politik keluarga dipekalongan, Jawa Tengah dengan mengambil kasus keluarga Djunaid, yang berpendapat bahwa dinasti politik lokal sangat mudah beradaptasi, dimana hal tersebut ditunjukkan dengan pergeseran dan perubahan strategi yang mereka buat. Adaptasi yang dilakukan merupakan respon dari peluang dan tantangan yang dihadapi akibat faktor eksternal maupun internal. Selanjutnya riset yang dilakukan oleh Ratu Vidya Nur'aini (2018) yang mengangkat kajian lahirnya dinasti politik studikamus: terbentuknya dinasti politik Mulyadi Jayabaya di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten (periode 2003-2017). Riset ini menemukan bahwa dinasti politik Mulyadi Jayabaya terbentuk dengan proses konsolidasi dan ekspansi kekuasaan yang didasari oleh kekayaan material dalam suksesi pemilu, keberhasilan membangun hubungan dengan jawara, jejaring keluarga, dan kemampuan Mulyadi

Jayabaya dalam membangun popularitasnya. Hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya dinasti politik di Lebak, menciptakan dominasi kekuasaan dengan kecilnyaruang persaingan politik dan ekonomi.

Studi dinasti politik di Banten dilakukan Leo Agustino (2014) menunjukkan bahwa dinasti politik di Banten mengikuti aliran *relativist* atau *suspent judgment*, dinasti politik pada awalnya dikenal sebagai jawara pengusaha. Sebagai pengusaha dan pemerintahan tentunya akses sumber daya dikendalikan oleh pemerintahan daerah. Dinasti pemerintahan yang didirikan tuan besar diturunkan kepada Ratu Atut sehingga potensi tersebut membuka celah bagi keluarga untuk mengontrol sumber daya dengan memasukan keluarganya dalam akses sumber daya. Studi mengkonfirmasi kajian Lande (1985) di Filipina mendapati bahwa dinasti politik keluarga menjadi logika politik. Lebih kurang terdapat 24 dinasti politik yang terjadi pada pemerintahan Filipina. Dipimpin oleh dinasti politik keluarga besar yang sama, dikenali dengan *god-parenthood*<sup>8</sup>.

Dinasti politik di Indonesia terjadi sejak orde baru dengan kuatnya hegemoni pemerintah, Golkar, dalam sistem politik di Indonesia membuat lembaga perwakilan rakyat yang seharusnya melakukan sistem pengawasan terhadap pemerintah hampir sama sekali mandul<sup>9</sup>. Padahal wakil rakyat harusnya mengawasi dan menyuarakan aspirasi dan kepentingan rakyat. Lengsernya Soeharto membangkitkan semangat baru dalam sistem politik Indonesia tidak banyak yang berubah, para pengamat mengatakan bahwa anggota-anggota legislatif lebih cenderung mementingkan kepentingan pribadi kerabatnya dibandingkan dengan memperjuangkan aspirasi rakyat.

Periodisasi yang tidak dibatasi akan berpotensi menimbulkan penyelewengan kekuasaan dan berpotensi korupsi. Kekuasaan harus di batasi agar tidak terjadi kesewenangan atas jabatan termasuk dalam membatasi periodisasi lembaga legislatif. Dikutip pernyataan Lord Acton yaitu, "*Power tends to corrupt, and absolute power tends to corrupts absolutely.*" Wacana periodisasi kekuasaan presiden, wakil presiden dan kepala daerah yang tanpa batas akan mencederai konstitusi namun bagaimana dengan aktor politisi

---

<sup>8</sup> Agustino Leo. 2014. *Politik Lokal Dan Otonomi Daerah*. Bandung: Alfabeta

<sup>9</sup> Winarno Budi. 2007. *Sistem politik Indonesia era reformasi*. Yogyakarta: Media Pesindo hlm 94

yang membangun dinasti politik di tingkat lokal ? pertanyaan ini mengawali dari riset ini ditulis dengan menggunakan teori demokrasi dan menjadi riset yang menginisiasi dinasti politik wujud kontrol kekuasaan pada tingkat lokal studi kasus Provinsi Kepulauan Riau.

## II. Kerangka Teoritik

Guna menganalisis lebih dalam mengenai dinasti politik dalam roda pemerintahan. penulis menggunakan beberapa konsep yang dianggap sesuai, yakni konsep demokrasi dan dinasti politik. Familisme sebagai budaya politik diartikan sebagai ketergantungan yang terlalu besar pada ikatan keluarga, yang melahirkan kebiasaan menempatkan keluarga dan ikatan kekerabatan pada kedudukan yang lebih tinggi daripada kewajiban sosial lainnya<sup>10</sup>. Dalam pengertian lainnya, familisme juga dipahami sebagai *new social order*, yakni dorongan psikologis bagi seseorang untuk dapat berkarir di dalam dua ranah yakni publik sebagai birokrat dan privat sebagai korporat-swasta. familisme (*familism*), yakni dinasti politik yang didasarkan secara murni pada hubungan darah langsung dalam keluarga (*consanguinity*) dan hubungan perkawinan (*marriage*) dengan klan lainnya. Bagi keluarga politik yang lebih lemah posisinya akan menguntungkan dengan keluarga politik yang lebih kuat karena akan menjamin eksistensi keluarga politik lemah tersebut. Riset ini menggunakan konsep dinasti politik yang menggunakan konsep familism menurut Garzon. Benih dinasti Politik di ranah lokal seperti Provinsi Kepulauan Riau mengarahkepada hubungan perkawinan dan hubungan darah secara langsung dalam keluarga.

Perspektif neopatrimonialisme, dinasti politik merupakan akses negative dari kelahiran otonomi daerah yang menciptakan situasi demokrasi terbajak oleh sirkulasi hubungan inti geneologis maupun non geneologis, berdasarkan relasi kekeluargaan yang memiliki kepentingan terhadap kelangsungan kekuasaan keluarga. Hal tersebut berdampak pada kerabat elit, sehingga menciptakan dinasti politik. Dinasti politik bertindak sebagai elit memerintah yang memiliki hubungan patronase dengan berbagai pihak, utamanya yakni tokoh informal yang berpengaruh dalam sosiokultural dan sosio politik dalam masyarakat, yang memiliki andil pada kelangsungan dinasti politik yang ada. Patronase diwujudkan dengan mengunci pos-pos pemerintahan dan

---

<sup>10</sup> Garzon, Adela. 2002. "Familism." Hal. 1-4, Dalam *International Encyclopedia Of Marriage And Family*, Diedit Oleh En J. Ponzetti. New York: Macmillan.

masyarakat oleh orang-orang terdekat atau kerabat<sup>11</sup>. Dinasti politik menempatkan jejaring keluarga kedalam jajaran pemerintahan hingga terbentuknya monopoli kekuasaan dan dalam membangun dinasti politik.

Demokrasi menurut Beetham ialah popular kontrol terhadap urusan publik dan politik berbasis persamaan hak kewarganegaraan<sup>12</sup>. Beethamian lebih menekankan ke popular kontrol dimana dalam hal ini fungsi popular kontrol dapat mengembalikan hak-hak politik bagi kewarganegaraan dan juga penentu bekerjanya demokrasi. Demokrasi memberikan peluang bagi setiap orang untuk memperoleh akses yang setara terhadap sumber-sumber daya untuk meningkatkan taraf hidup. Demokrasi ala Beethamian mengkerangkai kontrol popular dan persamaan politik, pengelolaan kesejahteraan dipahami sebagai isu publik yang tunduk pada kontrol popular dan persamaan politik<sup>13</sup>.

Barometer pengukuran kebebasan sejatinya ialah melalui cara-cara demokrasi. Demokrasi sebagai pintu masuknya nilai-nilai kebebasan. Menurut Schumpeter (Schumpeter, 1976) demokrasi ialah metode berkompeterisi untuk memperebutkan jabatan-jabatan politik (kepala daerah, kepala negara, dll), demokrasi elektoral yang diungkapkan oleh Schumpeter. Demokrasi ala Schumpeterian berfokus pada arena kompetisi bagi para elit memperebut dukungan publik. Pemilu sebagai alat berdemokrasi menurut Schumpeter, pesta rakyat yang diadakan untuk memilih pemimpin-pemimpin jabatan politik. Kehendak rakyat dan kebebasan individu merupakan demokrasi itu sendiri<sup>14</sup>.

Konteks pembangunan demokrasi di Indonesia masih pada tataran menuju kedewasaan, demokrasi dibangun atas dasar adu kuasa baik secara terang-terangan maupun secara sangat terselubung, demokrasi dikembangkan melalui pewacanaan dan dengan begitu arah pengembangan demokrasi tergiring oleh arus pewacanaan yang bergulir<sup>15</sup>. Patronase salah satu metode yang digunakan untuk penggalangan dukungan. Patronase

---

<sup>11</sup> Vidya, Ratu.2018. *Lahirnya Dinasti Politik Studi Kasus: Terbentuknya Dinasti Politik Mulyadi Jayabaya Di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten* (Periode 2003-2017)

<sup>12</sup> Beetham, David.1999. *Democracy and Human Right*. Oxford: Polity Press.

<sup>13</sup> Pascarina dkk. 2015. *Berebut Kontrol atas kesejahteraan*. Yogyakarta : POLGOV

<sup>14</sup> Schumpeter, Joseph A., (1972). *Capitalism, socialism, and democracy*. NewYork

<sup>15</sup> Pascarina dkk. 2015. *Berebut Kontrol atas kesejahteraan*. Yogyakarta : POLGOV

sebagai `sebuah pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye, dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari mereka<sup>16</sup>. identifikasi terhadap sindrom korupsi, penggalangan dana ilegal, serta relasi informal yang menyambungkan birokrat, elite politik dan elite bisnis di tingkat lokal serta membangun benih dinasti politik melalui dukungan politik.

### **III. Metode Penelitian**

Penelitian ini penulis menggunakan pengumpulan data penelitian kepustakaan atau *library research*. Penulis memanfaatkan sumber-sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian dengan melakukan penelusuran dan pencarian dokumen dan buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga menjadi bahan penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan mengelompokan data yang bersifat kualitatif. Metode ini menggambarkan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada dan sedang berlangsung dengan jalan mengumpulkan, memahami alur peristiwa secara kronologis, dan menjelaskan data yang diperoleh untuk kemudian dianalisis sesuai teori yang ada. Obyek yang diteliti yaitu aktor politisi di Provinsi Kepulauan Riau.

### **IV. Hasil dan Pembahasan**

Dinamika aktor politisi di tingkat lokal mencerminkan bahwa pendalaman demokrasi melalui pemilihan umum tidak serta merta melepaskan dari politik patronase maupun klientelisme. Politik ini digunakan sebagai pelenggangan kekuasaan politisi ditingkat lokal dengan membangun benih dinasti politik dalam pemerintahan tingkat lokal secara masif. Beberapa poin yang ingin disampaikan penulis dalam melakukan riset ini.

### **V. Dinamika Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Legislatif**

Konsep demokrasi yang dibawa oleh Beetham menghadapkan kontrol publik mekanisme lebih luas. Mekanisme publik termasuk mengontrol

---

<sup>16</sup> Aspinall, E dan Sukmajati, M. (2015). *Politik uang di Indonesia patronase dan klientisme pada pemilu legislatif 2014*. Yogyakarta: polgov

didalam sistem pemerintahan perwakilan rakyat di Indonesia yang mengatur bahwa masa jabatan hanya lima tahun dan tidak diatur didalam undang-undang pembatasan periodisasi bagi lembaga legislatif. Akibatnya banyak caleg "senior" setiap pesta demokrasi ikut menjadi calon legislatif meskipun telah terpilih beberapa kali pada tahun sebelum-sebelumnya.

Berbeda dengan Undang-Undang yang mengatur presiden dan wakil presiden menjabat selama lima tahun dan hanya bisa dua periodisasi. Sejak berakhirnya masa orde baru, aktor politisi kembali ke daerah-daerah untuk mendapatkan tampuk kekuasaan. Ternyata desentralisasi bukan akhir dari demokrasi lemahnya bangsa dalam memobilisasi elit dan fragmentasi administrasi desentralisasi sendiri memiliki efek samping seperti jaringan patrimonial dan korupsi kedaerah, mengkontrofosi massa hingga muncul tiga klasifikasi kelompok yaitu pertama, terbentuk dari keluarga yang berasal dari aristokrat yang bertahan hidup hingga desentralisasi, kedua bos partai pilar orde baru, ketiga pendatang baru pembentukan provinsi baru<sup>17</sup>.

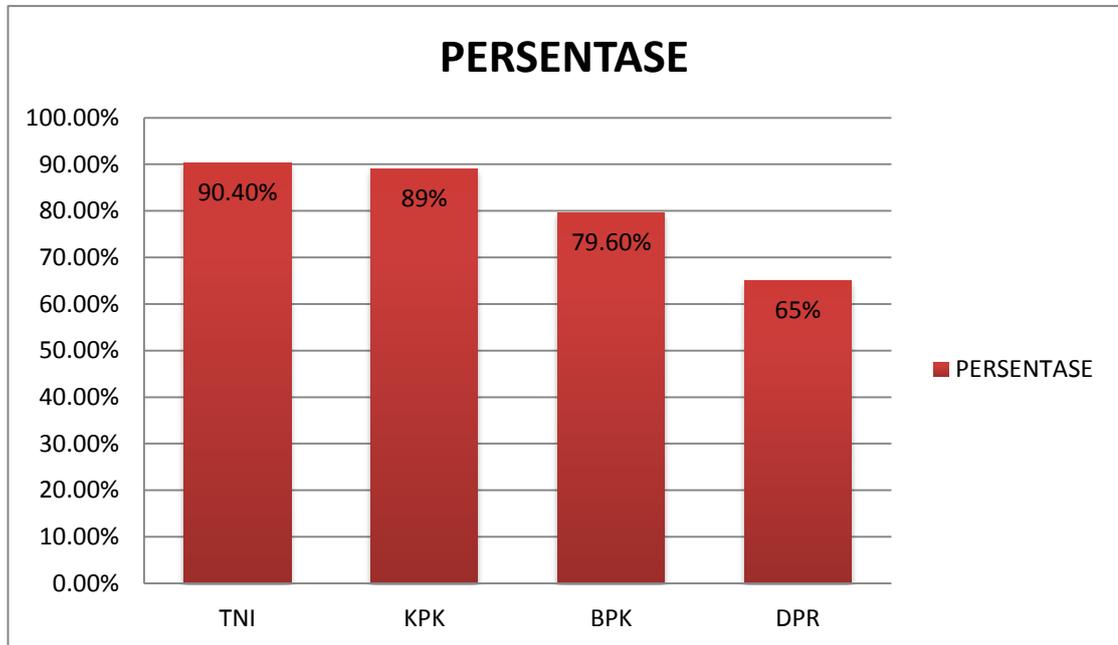
Menurut ingkaran Survei Indonesia (LSI) Danny JA mengungkapkan bahwa kepercayaan masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih menjadi yang terendah di antara lembaga negara lainnya diantaranya DPR mendapatkan tingkat kepercayaan terendah dibandingkan dengan institusi lainnya. Berikut peta persentase tingkat kepercayaan masyarakat menurut (LSI) Denny JA<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> Bunte Marco Dan Ufen Andreas. 2009, *Democartization On Post Soeharto Indonesia*. Rotledge Contemporary Southeast Asia Series

<sup>18</sup> Kompas harian diakses 20 Juni 2019

### Lembaga Negara Dengan Tingkat Kepercayaan Tertinggi Hingga Terendah



Sumber: berita online Kompas, 2018

Tingkat kepercayaan yang terhadap institusi DPR sangat rendah dibandingkan dengan beberapa institusi lainnya. Rendahnya tingkat kepercayaan yang dimiliki lembaga legislatif justru sebagai catatan bahwa legislatif sebagai representasi dari rakyat semestinya mendapatkan legitimasi kepercayaan yang lebih tinggi jauh dari harapan. Pada ajang demokrasi rakyat sebagai agen pengontrol publik untuk mengawali pemilihan umum guna menentukan pilihan. Demokratisasi yang memberikan kuasa kepada rakyat sebagai agen kontrol justru dinegasikan oleh aktor politisi melakukan politik patronase dan klientisme di tingkat lokal yang kian berkembang. Hubungan timbal balik antara politisi senior dan rakyat tak jarang melalui populisme dan pragmatik pemerintah untuk meraih dukungan. kajian politik patronase dalam pemilu Indonesia 2014 (Aspinall Dan Sukmajati, 2015) menyatakan bahwa berbagai skema kesejahteraan seringkali dikembangkan terutama bertujuan untuk memperoleh dukungan electoral dan dikelola dengan memelihara ikatan klientisme.<sup>19</sup> Patronase didefinisikan sebagai

<sup>19</sup> Aspinall, E dan Sukmajati, M. (2015). *Politik uang di Indonesia patronase dan klientisme pada pemilu legislatif 2014*. Yogyakarta: polgov

pertukaran keuntungan demi memperoleh dukungan politik. Barang-barang kelompok (*Club goods*) sebagai praktek patronase yang diberikan keuntungan kelompok sosial ketimbang keuntungan individual. Adanya *pork barrel* yaitu kegiatan yang ditujukan kepada publik dan didanai dengan dana publik dengan harapan publik akan memberikan dukungan politik kepada kandidat tertentu tidak hanya itu, otonomi daerah memberi ruang besar bagi bangkitnya kekuatan lokal untuk menjadi pemain utama. Masalah yang timbul masyarakat lokal hanya menjadi penonton dalam demokratisasi dan otonomi daerah di daerahnya. Sehingga apapun yang dilakukan oleh politisi tidak membawa perubahan apapun dengan janji-janji kampanye yang tidak bisa terpenuhi. Dari hasil survey diatas dapat dikonstruksikan bahwa DPR tidak mendapatkan legitimasi penuh atas kekuasaan dari rakyat ditingkat lokal maupun nasional.

Dalam sistem berdemokrasi seperti yang diterapkan Indonesia saat ini, demokrasi perwakilan pola relasi sebagai agen keterwakilan tidak berjalan dengan baik. Tiadanya kejelasan peran dan posisi partai politik, konstituen mengancam demokrasi menjadi semu<sup>20</sup>. Parlemen dan partai politik terlihat asyik menjalankan agendanya sendiri dan seringkali lamban dalam merespon kebutuhan maupun masalah yang berkembang di masyarakat. Ancaman krisis demokrasi representasi dimana warga masyarakat mulai tidak percaya bahwa agen representasi yang mewakili mereka mampu bekerja dengan baik dan memperjuangkan maslaah yang dihadapi atau konstituennya. Periode yang berkepanjangan terhadap kekuasaan menuaikan popularitas untuk memasukan keluarga dalam politik hingga menjadi dinasti politik di tingkat lokal.

## **VI. Fenomena Dinasti Politik di Tingkat Lokal**

Familisme sebagai budaya politik diartikan sebagai ketergantungan yang terlalu besar pada ikatan keluarga, yang melahirkan kebiasaan menempatkan keluarga dan ikatan kekerabatan pada kedudukan yang lebih

---

<sup>20</sup> Rozaki Sunaji.2014.Dari *Representasi Simbolik Menuju Representasi Substantive Potret Representasi Konstituensi Dan Komunikasi Politik Anggota Dewan Perwakilan Daerah*. Yogyakarta: Institute For Research And Empowerment hlm 16-17

tinggi daripada kewajiban sosial lainnya. Familisme juga dipahami sebagai *new social order*, yakni dorongan psikologis bagi seseorang untuk dapat berkarir di dalam dua ranah yakni publik sebagai birokrat dan privat sebagai korporat-swasta. (*familism*), yakni dinasti politik yang didasarkan secara murni pada hubungan darah langsung dalam keluarga (*consanguinity*) dan hubungan perkawinan (*marriage*) dengan klan lainnya.<sup>21</sup>

Dengan menggunakan sudut pandang persamaan (*equality*), dinasti politik telah menutup peluang yang sama bagi setiap warganegara. Praktik yang terus menerus dilakukan dengan membangun dinasti politik lambat laun akan membusukan perekonomian dan perpolitikan negara. seperti yang diungkapkan Lord Acton yang menyatakan bahwa *power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*. Dan, kekuasaan yang mutlak lahir dan diamalkannya dinasti politik<sup>22</sup> Adanya dinasti politik dalam tubuh lembaga perwakilan rakyat juga menjadi persoalan penting. Fenomena dinasti politik dalam ranah lokal muncul seiring dengan diberlakukannya pemilu langsung di tingkat lokal. Seiring dengan berjalannya proses tersebut sebagai wujud demokratisasi di aras lokal, berbagai elit bermunculan di daerah untuk mengkooptasi dengan proses tersebut.

Menurut Weber merujuk bahwa orang Asia tidak mampu dan kurang matang dalam memegang tanggung jawab (politik dan ekonomi) negara sehingga tidak sedikit dari mereka yang mengandaikan administrasi politik yang diamankan padanya sebagai hak pribadi yang dianggap sebagai bagiandari harta pribadi yang boleh dieksploitasi<sup>23</sup> . Akibat dari kelemahan ini, mereka tidak mampu membedakan antara hak masyarakat umum terkait dengan permasalahan tanggung jawab dan akuntabilitas dan hak pribadi. Akibatnya korupsi politik dianggap hal biasa dan tidak terlalu bermasalah. Nilai-nilai utama yang biasa diasosiasikan dengan kelas menengah di Barat seperti kemandirian, kompetensi, dan individualisme. Berbeda dengan di Indonesia nilai-nilai yang menekankan harmoni dan 'saling tolong-menolong'

---

<sup>21</sup> Garzon, Adela. 2002. "Familism." Hal. 1-4, Dalam *International Encyclopedia Of Marriage And Family*, Diedit Oleh En J. Ponzetti. New York: Macmillan.

<sup>22</sup> Agustino Leo.2014.*Politik Lokal dan Otonomi Daerah*. Bandung:Alfabeta hlm:209-211

<sup>23</sup> Agustino Leo.2014.*Politik Lokal dan Otonomi Oaerah*. Bandung:Alfabeta hlm:209-211

terutama lewat jalur keluarga<sup>24</sup>.

Kemunculan para elit dalam demokrasi lokal tersebut lazim dikenal dalam istilah reorganisasi kekuasaan. Reorganisasi ini diartikan sebagai kembalinya pengaruh kekuasaan politik elit lokal ke dalam era demokrasi. Dinasti politik familisme berbasis populisme yang ditonjolkan dalam suksesi pemerintahan adalah upaya "mengamankan" progam pencalegkan sebelumnya. Hal ini terkait reproduksi wacana heroisme dan populisme program pemerintahan sebelumnya yang dijadikan bahan kampanye. Setidaknya inilah yang terjadi dalam kandidasi anggota legislatif di Provinsi Kepulauan Riau antara lain: Tanjung Pinang ibu kota Provinsi Kepulauan Riau Lis Darmansyah dan Weni Pustoko, Lis merupakan caleg DPRD Kepri dapil 1 dan istrinya calon legislatif kota Tanjung Pinang. Huznizar Hood calon legislatif DPR RI dan istrinya Peppy Chandra sebagai calon legislatif Tanjung Pinang<sup>25</sup>. Di lain wilayah yakni Kabupaten Karimun ayah dan anak mencalonkan diri sebagai calon legislatif yakni Rocky Marciano Bawole merupakan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dapil Karimun periode 2009-2014 hingga 2014-2019 serta mencalonkan kembali dirinya dan anaknya M.Ewal Risbalqi calon legilatif dapil Karimun<sup>26</sup>. Pola relasi yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaan melalui patronase dan klientelisme. kajian politik patronase dalam pemilu Indonesia 2014 (Aspinall Dan Sukmajati, 2015) menyatakan bahwa berbagai skema kesejahteraan seringkali dikembangkan terutama bertujuan untuk memperoleh dukungan electoral dan dikelola dengan memelihara ikatan klientisme.<sup>27</sup> Patronase didefinisikan sebagai pertukaran keuntungan demi memperoleh dukungan politik. Selain alasan tersebut beberapa penyebab mengapa mereka terus terpilih meskipun telah beberapa periode menjabat juga dikarenakan

---

<sup>24</sup> Tomagola Tamrin.2006. *Republik Kapling*. Yogyakarta:Resist book hlm: 197

<sup>25</sup> Sumber:Patria. Fenomena Suami istri jadi caleg di Kepri.Tribun Batam.id. diakses melalui <https://batam.tribunnews.com/2018/07/23/fenoma-suami-istri-jadi-caleg-di-kepri-ini-pandangan-pengamat-politik-tanjungpinang?page=3> pada Agustus 2019

<sup>26</sup> Sumber: Pemuda 22 tahun ditemani ayahnya mendaftarkan diri menjadi bacaleg pemilu 2019 dapil karimun diakses melalui <https://batam.tribunnews.com/2018/02/23/pemuda-22-tahun-ini-ditemani-ayahnya-daftar-jadi-bacaleg-pemilu-2019-dapil-karimun> pada Agustus 2019

<sup>27</sup> Aspinall,E dan sukmajati, M.(2015). *Politik uang di Indonesia patronase dan klientisme pada pemilu legislatif 2014*. Yogyakarta: polgov

pertama, perilaku politik merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat, di antara lembaga-lembaga pemerintah, dan di antara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik (Surbakti, 2007:16)<sup>28</sup>. Dalam konteks masyarakat yang majemuk atau plural seperti Indonesia, perilaku politik individu akan sangat dipengaruhi oleh produksi faktor-faktor sosial, ekonomi, psikologi, sejarah, politik dan budaya. Kesamaan budaya mendorong masyarakat untuk terus memilih yang sesuai dengan ikatan psikologis yang dibangun oleh kandidat. Kedua, tidak adanya pembatasan perodesasi membuat kandidat yang memiliki kharismatis dan popularitas di masyarakat terus mencalonkan diri sebagai kesempatan besar bagi keluarga untuk ikut dalam politik electoral ditingkat lokal<sup>29</sup>.

Merujuk persoalan diatas peranan negara dan pemerintah dalam melakukan sosialisasi terhadap individu terlihat lemah jika dibandingkan dengan keluarga. Hal ini mnegungkapkan pengaruh antara keluarga berkontribusi terhadap sosialisasi perilaku anggota keluarganya. Pemimpin politik dan birokrat yang dianggap sebagai pemimpin keluarga akan dapat meningkatkan sosialisasi yang positif antara pemerintah dan warga yang diperintah . dinasti politik dan praktik korupsi serta nepotisme yang berlanjut adalah hasil dari sosialisasi adat terdahulu. Hal ini didukung dengan kajian Huntington (1986). Huntington berpendapat bahwa peraturan tradisional dalam kebanyakan masyarakat tidak memberikan ganjaran yang tegas kepada pelaku personal kekeluargaan. Akibatnya ranah publik dan privat menjadi kabur, tanggung jawab terhadap negara dan tanggung jawab terhadap keluarga menjadi tidak jelas. Ini yang mencetuskan masyarakat yang buta terhadap perilaku negatifnya sendiri, apakah ia berlaku nepotisme, korupsi atau sebaliknya<sup>30</sup> .

---

<sup>28</sup> Surbakti, Ramlan (2007). "*Memahami Ilmu Politik.*" Kepustakaan Populer Gramedia (KGP), Jakarta.

<sup>29</sup> Bathoro, Alim.2011. *Perangkap Dinasti Politik Dalam Konsolidasi Demokrasi.* Jurnal Fisip Umrah2.vol 2. Hal 117

<sup>30</sup> Agustino Leo.2014.*Politik Lokal Dan Otonomi Daerah.* Bandung:Alfabeta hlm:209-211

## VII. Basis Sumber Daya Untuk Meraih Kekuasaan

Sumber daya material berupa kekayaan, harta benda (ekonomi) menjadi salah satu sumber kekuasaan untuk mendapatkan pengaruh meraih kekuasaan. Adanya distribusi kekuasaan yang tidak merata, dimana hanya seseorang/ sekelompok orang tertentu memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan yang lainnya, dipengaruhi oleh jumlah sumber, distribusi sumber, dan momentum menggunakan sumber dan hasil penggunaan sumber kekuasaan<sup>31</sup>. Aktor-aktor politisi yang memiliki sumber kekayaan yang potensial memiliki peluang yang besar untuk meraih kekuasaan. Sumber daya untuk meraih kekuasaan juga bisa didapatkan melalui sumber daya non material seperti popularitas, kharisma, jejaring yang berpengaruh dalam koalisi politik<sup>32</sup>. Sementara modal kultural berupa modal informasi, pendidikan dan keterampilan menjadi penunjang sumber daya untuk meraih kekuasaan.

Budaya membangun dinasti politik terlihat juga ketika banyaknya aktor-aktor yang terus mencalonkan diri sebagai “wakil rakyat” setiap periode. Mekanisme pencalonan yang ada masih memiliki kelemahan-kelemahan. Timbul kesan, tidak ada upaya serius untuk mendiskusikan kualitas calon anggota legislatif di setiap perodesasi penyelenggaraan pemilu. Mekanisme pencalonan yang masih mengandalkan penjangkaran oleh partai politik nyatanya tidak banyak memberikan perubahan.

Ilmuwan Robert Mitchel melakukan studi yang menemukan munculnya oligarki pemerintahan ditangan segelintir orang adalah suatu keniscayaan. Lambat atau cepat, setiap organisasi demokratis akan terperangkap dalam oligarki. Organisasi seperti partai politik dibangun atas tata cara demokrasi, keniscayaan oligarki hanya menunggu waktu yang kemudian dinamakan hukum besi oligarki<sup>33</sup>. Indonesia menunjukkan bahwa proses demokrasi maupun hak demokrasi hanya berlangsung disuatu lapisan tipis kelas menengah dan karena itu hanya di nikmati oleh segelintir *inhaler*

---

<sup>31</sup> Surbakti, Ramlan (2007). “*Memahami Ilmu Politik.*” Kepustakaan Populer Gramedia (KGP), Jakarta

<sup>32</sup> Vidya, Ratu.2018. *Lahirnya Dinasti Politik Studi Kasus: Terbentunya Dinasti Politik Mulyadi Jayabaya Di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten* (Periode 2003-2017)

<sup>33</sup> Tomagola Tamrin.2006. *Republik Kapling.* Yogyakarta:Resist book hlm.209

terdidik dan keturunannya.

Pembatasan periodisasi anggota lembaga perwakilan rakyat menjadi perlu dikarenakan melihat keadaan Indonesia saat ini. Tidak adanya kemajuan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, salah satunya juga bersumber dari anggota lembaga perwakilan rakyat yang tidak memiliki inovasi serta perbaikan sistem kerja. Tidak adanya pembatasan periodisasi menyebabkan adanya ketidakseimbangan antara orang yang baru mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat dengan calon petahana. Calon petahana memiliki akses dan fasilitas yang lebih memadahi untuk melakukan sosialisasi dan kampanye. Barang-barang kelompok (*Club goods*) sebagai praktek patronase yang diberikan keuntungan kelompok sosial ketimbang keuntungan individual. Adanya *pork barrel* yaitu kegiatan yang ditujukan kepada public dan didanai dengan dana publik dengan harapan publik akan memberikan dukungan politik kepada kandidat tertentu. Dikutip pernyataan Lord Acton yaitu, "*Power tends to corrupt, and absolute power tends to corrupts absolutely.*"

Kapasitas politik aktor khususnya aktor gerakan demokrasi dalam meningkatkan kualitas representasi dan memajukan demokrasi seperti DPR, DPRD, DPD, badan-badan penyelenggara pemilihan umum, serta perbaikan prosedur dan sistem elektoral<sup>34</sup>. Peninjauan terhadap aspek kapasitas aktor dalam demokrasi bukan sekedar memotret kondisi demokrasi dalam situasi sewaktu. Pemahaman atas dinamika proses membuat demokrasi tidak semata-mata dipandang sebagai tujuan, tetapi juga cara (*means*). Hal tersebut dilakukan melalui institusi prinsipil seperti kesetaraan warga negara, *rule of law*, prinsip persamaan dihadapan hukum, transparan dan anti korupsi (*good governance*), supremasi sipil, kebebasan berpartai keberlangsungan pemilihan umum yang bebas dan adil, termasuk juga kebebasan pers dan kebebasan akademik, jaminan atas partisipasi warga negara, dan lain-lain.

Demokrasi ialah syarat yang mesti dipenuhi oleh negara-negara yang memiliki esensi demokrasi mekanisme memilih pemimpin melalui kontestasi

---

<sup>34</sup> Samadhi Willy.2016. *Blok Politik Kesejahteraan Merebut Kembali Demokrasi*.Yogyakarta: PolGov

mendapatkan suara rakyat sehingga pemimpin yang terpilih tersebut bisa membuat keputusan-keputusan politik sebuah negara. Sudah tentu dalam pemilihan umum sebagai ajang rotasi kekuasaan, mendapatkan wakil rakyat yang mampu mempresentasikan rakyat secara demokratis, bebas dan nir kekerasan serta melakukan pendidikan politik secara luas kepada masyarakat. Basis sumber daya dijadikan basis untuk meraih kekuasaan hingga menimbulkan potensi dinasti politik terus terjadi. Penulis menawarkan solusi awal untuk mengembalikan esensi demokrasi yang sehat dengan pembatasan perodesasi menjadi solusi awal agar sistem pemerintahan berjalan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa. Pemberian pendidikan politik kepada cendekiawan muda sebagai pelopor sosialisasi di masyarakat menjadi pemilih cerdas serta mendorong partai untuk melakukan saringan politik.

#### **VIII. Kesimpulan dan Saran**

Melalui analisis yang telah dipaparkan penulis menyimpulkan, Fenomena upaya pembangunan dinasti politik pasangan suami istri bahkan satu keluarga ayah-anak menjadi caleg merupakan normalisasi gejala-gejala patronase ditingkat lokal budaya membangun dinasti politik terlihat dengan terus mencalonkan diri sebagai "wakil rakyat". Beberapa penyebab mengapa mereka terus terpilih dan membangun upaya dinasti politik meskipun telah beberapa periode menjabat yaitu pertama, perilaku politik merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat, di antara lembaga-lembaga pemerintah, dan di antara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan, politik pada dasarnya merupakan perilaku politik. Dalam konteks masyarakat yang majemuk atau plural seperti Indonesia, perilaku politik individu akan sangat dipengaruhi oleh produksi faktor-faktor sosial, ekonomi, psikologi, sejarah, politik dan budaya. Kedua, tidak adanya pembatasan perodesasi membuat kandidat yang memiliki kharismatis dan popularitas di masyarakat terus mencalonkan diri sebagai kesempatan besar bagi keluarga untuk ikut dalam politik electoral ditingkat lokal.

Basis sumber daya untuk meraih kekuasaan menjadi salah satu aspek penting. Pemilihan umum dengan biaya politik yang tinggi mengharuskan sumber daya material menjadi basis penting meraih dukungan politik.

Kemampuan dan kharismatis politisi dimasyarakat menjadi modal sumber daya non material yang perlu diperhitungkan sehingga lingkaran popularitas dimanfaatkan untuk membangun dinasti politik.

Sebaiknya pemerintah memberlakukan pembatasan perodesasi menjadi solusi awal agar sistem pemerintahan berjalan sesuai dengan tujuan awal. Pemberian pendidikan politik kepada masyarakat serta mendorong partai untuk melakukan saringan politik. Mendorong KPU membuat peraturan yang tegas serta memperbaiki peraturan kandidat politisi yang mengikuti pemilihan umum serentak hingga ke tingkat lokal.

### Daftar pustaka

#### Buku dan Jurnal

- Schumpeter, Joseph A., (1972). *Capitalism, Socialism, And Democracy*. New York
- Beetham, David. 1999. *Democracy and Human Right*. Oxford: Polity Press
- Pascarina dkk. 2015. *Berebut Kontrol atas kesejahteraan*. Yogyakarta : POLGOV
- Aspinall, E dan sukrajati, M. (2015). *Politik uang di Indonesia patronase dan klientisme pada pemilu legislatif 2014*. Yogyakarta: polgov
- Bunte Marco Dan Ufen Andreas. 2009, *Democratization On Post Soeharto Indonesia*. Rotledge Contemporary Southeast Asia Series
- Garzon, Adela. 2002. "Familism." Hal. 1-4, Dalam *International Encyclopedia Of Marriage And Family*, Diedit Oleh En J. Ponzetti. New York: Macmillan.
- Agustino Leo. 2014. *Politik Lokal Dan Otonomi Daerah*. Bandung: Alfabeta
- Rozaki Sunaji. 2014. *Dari Representasi Simbolik Menuju Representasi Substantive Potret Representasi Konstituensi Dan Komunikasi Politik Anggota Dewan Perwakilan Daerah*. Yogyakarta: Institute For Research And Empowerment.
- Winarno Budi. 2007. *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*. Yogyakarta: Media Pesindo
- Tomagola Tamrin. 2006. *Republik Kapling*. Yogyakarta: Resist book
- Samadhi Willy. 2016. *Blok Politik Kesejahteraan Merebut Kembali Demokrasi*. Yogyakarta: PolGov

- Yusron. 2009. *Elite Lokal Dan Civil Society*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia
- Bathoro, Alim. 2011. Perangkap Dinasti Politik Dalam Konsolidasi Demokrasi. *Jurnal Fisip Umrah* 2.vol 2. Hal 117
- Surbakti, Ramlan (2007). "*Memahami Ilmu Politik*." Kepustakaan Populer Gramedia (KGP), Jakarta.
- Savirani, Amalinda. 2016. *Survival Againts The Odds: The Djunaidi Family Of Pekalongan, Central Java*. South East Asia Research
- Vidya, Ratu. 2018. *Lahirnya Dinasti Politik Studi Kasus: Terbentunya Dinasti Politik Mulyadi Jayabaya Di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten (Periode 2003-2017)*

### **Berita Online**

- Berita Harian Kompas diakses pada 20 Juni 2019 lihat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/31/17242921/survei-lsi-dpr-lembaga-negara-dengan-tingkat-kepercayaan-terendah?page=all>
- Patria. Fenomena Suami istri jadi caleg di Kepri. *Tribun Batam.id*. diakses melalui <https://batam.tribunnews.com/2018/07/23/fenoma-suami-istri-jadi-caleg-di-kepri-ini-pandangan-pengamat-politik-tanjungpinang?page=3> pada Agustus 2019
- Pemuda 22 tahun ditemani ayahnya mendaftarkan diri menjadi bacaleg pemilu 2019 dapil karimun diakses melalui <https://batam.tribunnews.com/2018/02/23/pemuda-22-tahun-ini-ditemani-ayahnya-daftar-jadi-bacaleg-pemilu-2019-dapil-karimun> pada Agustus 2019

### **Peraturan Perundangan**

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum